

LAB 45 — TELAHAH KEBIJAKAN

No. 0023 - 2 September 2025

Telaah Kebijakan LAB 45 adalah wadah yang dirancang untuk menyampaikan pandangan kritis dan analisis terkini dari para peneliti serta analisis kebijakan terkait berbagai isu strategis seputar politik keamanan, ekonomi politik, politik media, dan gender. Platform ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam sekaligus menawarkan gagasan inovatif dalam menghadapi tantangan lokal ataupun global. Pendapat yang tercantum dalam setiap komentar merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak merefleksikan posisi resmi LAB 45. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim kami melalui lab45@lab45.id.



Membenahi Citra Polri: Polwan sebagai Ujung Tombak Transformasi

Hari ini, 1 September 2025, Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia merayakan ulang tahun ke-77. Di tengah sorotan publik terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Polri, perayaan ini harus menjadi momen untuk merefleksikan peran Polwan. Lebih dari sekadar simbol keberagaman, Polwan memiliki potensi besar sebagai ujung tombak transformasi yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Namun, untuk mencapai potensi itu, institusi Polri harus berani melepaskan Polwan dari belenggu peran-peran gender yang telah lama membatasinya.

Dalam setiap era, institusi yang berkuasa selalu mencerminkan nilai-nilai dominan pada zamannya. Di tengah krisis kepercayaan publik yang dialami institusi kepolisian, masuknya perempuan, atau Polwan, ke dalam struktur kepolisian menghadirkan sebuah fenomena yang patut dianalisis secara kritis, bukan hanya sebagai soal kesetaraan, tetapi juga sebagai potensi transformasi esensial. Meskipun Polwan telah banyak menorehkan prestasi, termasuk mencapai pangkat Jenderal Bintang 2 seperti Irjenpol(Purn) Basaria Panjaitan, Irjenpol(Purn) Sri Handayani, Irjenpol (Purn) Ida Oetari, dan Irjenpol Arradina Zessa Devy, namun kehadiran Polwan seringkali hanya dipandang sebagai wajah yang lebih humanis, lembut, dan empatik dari institusi yang dikenal dengan kekuatan dan otoritasnya. Meskipun narasi ini memiliki validitas, ia juga membawa implikasi yang lebih kompleks, yang dapat diuraikan melalui tiga kerangka teoretis utama. Pertama, Teori Peran Gender (Gender Role Theory). Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat, melalui norma-norma yang terbentuk, menetapkan peran, perilaku, dan harapan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kepolisian, teori ini menjelaskan mengapa Polwan secara historis sering kali distereotipkan ke dalam peran-peran “feminin” seperti penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak, pelayanan administrasi, atau kegiatan pembinaan masyarakat. Meskipun peran-peran ini vital, stereotip ini dapat membatasi ambisi dan potensi mereka. Untuk mencapai kesetaraan substantif, Polwan harus dibebaskan dari peran stereotip ini. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama dalam penugasan operasional yang strategis



**Jaleswari
Pramodhawardani**
*Kepala,
Laboratorium Indonesia
2045*

dan peran kepemimpinan yang menantang, membuktikan bahwa kompetensi tidak mengenal gender.

Kedua, Teori Sosiologi Organisasi. Setiap organisasi, termasuk institusi kepolisian, memiliki budaya internalnya sendiri yang sangat menentukan dinamika kerja anggotanya. Teori Sosiologi Organisasi menganalisis struktur dan dinamika ini, dan dalam kasus kepolisian, ia menyoroti budaya yang sering disebut sebagai “*macho culture*”. Budaya ini, yang mengagungkan kekuatan, agresivitas, dan dominasi, secara inheren dapat menghambat kemajuan karier Polwan. Sebagai contoh, studi oleh Acker (1990) dalam bukunya *Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations*, menunjukkan bagaimana struktur organisasi secara tidak sadar dibangun di sekitar tubuh dan pengalaman maskulin. Hal ini menciptakan tantangan nyata bagi Polwan, mulai dari diskriminasi tersembunyi hingga kesulitan dalam menembus “langit-langit kaca” (*glass ceiling*) untuk posisi-posisi kepemimpinan. Mengubah budaya ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil.

Ketiga, Teori Kepemimpinan Transformasional

Teori ini, yang dipopulerkan oleh James MacGregor Burns (1978) dalam karyanya *Leadership*, menekankan pada gaya kepemimpinan yang menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan positif. Teori ini berfokus pada pemimpin yang mampu memberdayakan para pengikutnya dan mengubah budaya organisasi. Dalam konteks ini, Polwan, dengan pendekatan yang umumnya lebih empatik dan berorientasi pada masyarakat, dapat menjadi agen kepemimpinan transformasional yang sangat dibutuhkan Polri saat ini. Kontras dengan gaya kepemimpinan tradisional yang hierarkis dan otoriter, Polwan berpotensi membawa gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan suportif. Mereka dapat memimpin dengan berfokus pada kesejahteraan anggota tim dan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membangun kembali kepercayaan dan legitimasi institusi secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan ini dan mengoptimalkan peran Polwan, institusi kepolisian harus berani melakukan reformasi struktural dan budaya. Ini termasuk mengatasi stigma dan diskriminasi, menciptakan jalur karier yang jelas, dan mendukung Polwan dalam menyeimbangkan tantangan profesional dan pribadi mereka. Pada akhirnya, keberhasilan Polwan bukan hanya diukur dari jumlah mereka, tetapi dari bagaimana mereka mengubah wajah institusi kepolisian menjadi lebih adil, responsif, dan transformatif.

Tantangan kedepan: Perempuan dalam Institusi Kepolisian

Dalam dunia modern, perdebatan tentang peran perempuan dalam kepolisian membuka pertanyaan filosofis yang lebih dalam, bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga tentang hakikat kekuasaan dan otoritas itu sendiri. Apakah esensi kepolisian, sebagai manifestasi dari otoritas negara, berubah saat Perempuan, sebagai “yang liyan” dari entitas politik tradisional, terlibat di dalamnya?

Argumen bahwa perempuan membawa “perbedaan” fundamental ke dalam praktik kepolisian memunculkan dikotomi moral yang problematis, sebagaimana diuraikan oleh Carol Gilligan: dikotomi antara moralitas keadilan dan moralitas kepedulian. Jika moralitas keadilan, yang berakar pada hukum universal dan objektivitas, adalah landasan otoritas kepolisian yang lama, sebuah otoritas yang mengukur keberhasilan melalui penangkapan dan penggunaan kekerasan, maka moralitas kepedulian menawarkan sebuah krisis.

Krisis ini bukan sekadar ketidakcocokan, melainkan sebuah pertanyaan mendasar: apakah tugas polisi adalah untuk menerapkan hukum secara impersonal, atau untuk memelihara tatanan sosial melalui hubungan interpersonal? Data empiris menunjukkan bahwa perempuan, yang cenderung beroperasi dari moralitas kepedulian, lebih jarang menggunakan kekerasan dan lebih responsif terhadap korban, terutama dalam konteks domestik. Ini adalah indikasi bahwa mereka memandang tugas mereka bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelayanan yang bersifat kuratif, yang bertujuan memulihkan, bukan sekadar menghukum.

Namun, di sinilah letak ironi tragisnya. Saat perempuan memasuki ruang otoritas, mereka menghadapi tekanan untuk mengadopsi norma-norma yang ada. Mereka menemukan diri mereka di antara dua dunia: dunia yang diatur oleh “aturan dan hak” (keadilan) dan dunia yang diatur oleh “hubungan interpersonal” (kepedulian). Beberapa penelitian mencatat bahwa, seiring waktu, sikap mereka cenderung “berkonvergensi” dengan rekan-rekan laki-laki mereka. Pertanyaannya bukanlah apakah mereka mengadopsi sikap maskulin, melainkan apakah institusi itu sendiri menuntut mereka untuk meninggalkan esensi moral mereka demi keberlanjutan otoritas.

Kita tidak boleh terbuai oleh narasi sederhana tentang kesetaraan. Masuknya perempuan ke dalam kepolisian mungkin bukan sebuah revolusi yang mengubah hakikat otoritas, melainkan sebuah ujian terhadap kekakuan institusi itu sendiri. Apakah institusi tersebut mampu mengakomodasi “pendekatan kepedulian,” atautkah ia akan memaksa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tunduk pada logika kekuasaan yang impersonal dan menempatkan kekuatan di atas segalanya? Pada akhirnya, peran perempuan dalam kepolisian mungkin bukanlah tentang “perbedaan” yang mereka bawa, melainkan tentang apakah institusi dapat berubah untuk merayakan pluralitas moral yang mendefinisikan kemanusiaan.

Polwan sebagai Aset Strategis: Belajar dari Dunia

Memandang Polwan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan aset strategis, adalah langkah krusial bagi transformasi Polri. Beberapa kasus di berbagai negara telah menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang untuk mengambil peran operasional yang menantang, mereka tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga membangun citra positif institusi.

Di Amerika Serikat, sebuah studi dari *National Center for Women & Policing* mengungkapkan sebuah fenomena penting: kehadiran Polwan di unit patroli secara signifikan mengurangi penggunaan kekuatan fisik, termasuk senjata api. Ini bukan berarti mereka kurang tangguh, melainkan mereka memiliki pendekatan yang berbeda, yang lebih mengutamakan de-eskalasi konflik. Kemampuan untuk menenangkan situasi tegang tanpa menggunakan kekerasan adalah keahlian yang sangat krusial dan dibutuhkan dalam membangun kepercayaan publik, sebuah hal yang seringkali hilang dalam penegakan hukum tradisional.

Hal serupa terlihat di Kanada. *Royal Canadian Mounted Police (RCMP)* secara proaktif menempatkan Polwan dalam tim investigasi kejahatan berat. Pendekatan mereka, yang berfokus pada komunikasi dan hubungan interpersonal, terbukti sangat efektif. Mereka memiliki kemampuan unik untuk mendapatkan keterangan dari saksi atau tersangka, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan keterampilan sosial adalah alat yang sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada kekuatan fisik dalam mengungkap kebenaran.

Di Norwegia, sebuah negara yang dikenal karena pendekatannya yang progresif, Polwan telah menduduki posisi-posisi kunci di unit-unit khusus, termasuk dalam tim anti-teror dan siber. Keberadaan mereka di posisi ini bukan sekadar simbol kesetaraan, melainkan bukti nyata bahwa kompetensi dan kemampuan profesional tidak dibatasi oleh gender. Ini adalah model yang menunjukkan bahwa otoritas dan kepemimpinan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, bukan hanya melalui kekuasaan hierarkis, tetapi juga melalui keahlian dan kepemimpinan yang menginspirasi.

Oleh karena itu, jika Polri ingin benar-benar maju dan membangun kembali legitimasinya di mata masyarakat, mereka harus menyadari bahwa kekuatan mereka tidak hanya terletak pada jumlah atau senjata, tetapi pada keragaman dan kualitas anggotanya. Membebaskan Polwan dari peran-peran stereotip dan menempatkan mereka dalam posisi strategis bukan hanya tentang kesetaraan gender, tetapi tentang sebuah visi untuk institusi yang lebih efektif, responsif, dan manusiawi di era modern.

Polwan untuk Masa Depan Polri yang Lebih Baik

Di tengah era yang semakin kompleks dan dinamis, Polri membutuhkan agen perubahan. Peringatan ulang tahun ke-77 Polwan harus menjadi momentum untuk refleksi termasuk menghentikan peran-peran yang membatasi. Untuk membenahi citra dan meningkatkan efektivitasnya, Polri harus melakukan transformasi mendalam dengan mengoptimalkan peran Polwan:

Pertama, Restrukturisasi Penempatan Tugas. Hentikan Pengekangan Peran. Alih-alih hanya menempatkan Polwan di unit pelayanan, Polwan harus diberi kesempatan untuk bertugas di unit-unit operasional yang selama ini dianggap “dominasi laki-laki,” seperti reserse, intelijen, dan detasemen khusus.

Kedua, Peningkatan Kepemimpinan. Polri harus secara proaktif mempercepat promosi Polwan untuk mengisi posisi-posisi strategis, mulai dari kepala satuan hingga kepala daerah. Ini akan mengirimkan pesan kuat bahwa kapabilitas adalah satu-satunya faktor penentu.

Ketiga, Pengembangan Kapasitas. Berikan pelatihan dan pendidikan yang setara bagi Polwan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam tugas-tugas operasional, mulai dari teknik investigasi forensik hingga penanganan terorisme.

Menempatkan Polwan sebagai garda terdepan transformasi bukanlah sekadar isu feminisme. Ini adalah strategi operasional yang cerdas untuk membangun institusi kepolisian yang lebih modern, efektif, dan paling penting, mendapatkan kembali kepercayaan publik yang sangat berharga. Dengan menempatkan Polwan sebagai ujung tombak transformasi, Polri tidak hanya akan memperbaiki citranya di mata publik, tetapi juga membangun institusi yang lebih profesional, modern, dan tangguh, yang mampu menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

*Jalan Mabas Hankam No. T65, Bambu Apus, Cilangkap, DKI Jakarta 13890
Email: lab45@lab45.id | Telpon: +62811452045*

*Silahkan hubungi tim editorial untuk pertanyaan melalui
lab45@lab45.id*